**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Sejak era reformasi tahun 1998 paradigma pembangunan di Indonesia telah bergeser dari model pembangunan yang sentralistik menjadi desentralistik. Pembagian kewenangan menjadi bagian dari arah kebijakan untuk membangun daerah yang dikenal dengan istilah kebijakan **“Otonomi Daerah”**. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi, luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu Ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaaan Sumber Daya Nasional yang berkeadiIan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.

Reformasi terus berlangsung dan perubahan kembali terjadi dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No 25 Tahun 1999.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Ditetapkan juga Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Terlepas dari siap atau tidaknya suatu daerah untuk melaksanakan kedua Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi.

Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: *pertama*, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. *Kedua*, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Selanjutnya jika dilihat tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sekarang Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pada dasarnya adalah otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakasa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Pemberian otonomi pada daerah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan, tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan dinamis didasarkan pada kondisi dan perkembangan pembangunan dan bertanggungjawab adalah pemberian otonomi yang diupayakan untuk memperlancar pembangunan di pelosok tanah air. Uraian di atas merupakan tujuan ideal dari otonomi daerah. Pencapaian tujuan tersebut tentunya tergantung dari kesiapan masing-masing daerah yang menyangkut ketersediaan sumber daya atau potensi daerah, terutama adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan berfungsi sebagal motor penggerak jalannya pemerintahan daerah.

Diberlakukannya kedua undang-undang tersebut, telah membuka era baru bagi pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia, maka tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah bertambah banyak. Dengan adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, merupakan berkah bagi daerah namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Untuk itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan yaitu, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang memberlakukan otonomi daerah merupakan langkah yang konkrit dalam mewujudkan desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Maksud dari Pemerintah Pusat memberikan hak otonomi kepada pemerintah daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Seiring adanya pemberlakuan otonomi daerah oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk mendayagunakan potensi daerahnya masing-masing demi memajukan daerah tersebut.

Darise (2009:2) mengungkapkan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu: (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat jangan menjadi prioritas, agar pendapatan asli daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih basar. Sedangkan Halim (2001:167) menyatakan bahwa pada kenyataannya, hampir sepuluh tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat, hal ini terlihat dari tingkat kemandirian pemerintah daerah masih rendah. Berdasarkan data dari laporan analisis data/pelaporan keuangan daerah provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013 rasio kemadirian kabupaten/kota di wilayah propinsi Jawa Barat Tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1

Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Kabupaten/Kota | Capaian (%) |
| 1 | Kota Cirebon | 17,59 |
| 2 | Kabupten Majalengka | 8,82 |
| 3 | Kabupaten Tasikmalaya | 4,90 |
| 4 | Kabupaten Kuningan | 9,61 |
| 5 | Kabupaten Subang | 9,39 |
| 6 | Kabupaten Cianjur | 12,57 |
| 7 | Kabupaten Sumedang | 14,35 |
| 8 | Kabupaten Sukabumi | 12,15 |
| 9 | Kota Sukabumi | 28,36 |
| 10 | Kabupaten Bogor | 38,46 |
| 11 | Kota Bogor | 38,27 |
| 12 | Kota Depok | 41,64 |
| 13 | Kabupaten Karawang | 31,50 |
| 14 | Kabupaten Purwakarta | 17,90 |
| 15 | Kabupaten Bekasi | 51,78 |
| 16 | Kota Bekasi | 59,20 |
| 17 | Kabupaten Cirebon | 16,30 |
| 18 | Kabupaten Indramayu | 12,12 |
| 19 | Kabupaten Garut | 8,77 |
| 20 | Kota Tasikmalaya | 19,21 |
| 21 | Kabupaten Ciamis | 5,24 |
| 22 | Kota Banjar | 14,91 |
| 23 | Kabupaten Bandung | 19,26 |
| 24 | Kota Cimahi | 27,64 |
| 25 | Kabupaten Bandung Barat | 11,68 |
| 26 | Kota Bandung | 59,23 |

*Sumber: Laporan analisis data/pelaporan keuangan daerah provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013*

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di wilayah Jawa Barat masih rendah dengan rasio rata-rata 22,73% artinya bahwa dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih rendah dan ketergantungan kepada pemerintah pusat dan propinsi sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena nilai pendapatan asli daerah masih dibawah total nilai transfer pusat, propinsi dan pinjaman. Rasio kemandirian pemerintah daerah ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya semakin rendah rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin tinggi.

Selain dituntut kemandirian, pemerintah daerah kabupaten/kota dituntut pula untuk menjalankan fungsi dan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan Iebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar.

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dan Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar Pendapatan Asli Daerah. Hal ini karena Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya.

Namun pada kenyataannya, berdasarkan data dari laporan analisis data/pelaporan keuangan daerah provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013 menggambarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah masih rendah. Hal tersebut bisa dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013

| No | Kabupaten/Kota | Capaian (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kota Cirebon | 14,32 |
| 2 | Kabupten Majalengka | 6,78 |
| 3 | Kabupaten Tasikmalaya | 3,40 |
| 4 | Kabupaten Kuningan | 6,33 |
| 5 | Kabupaten Subang  *Dilanjutkan Tabel 1.2* | 6,70 |
| 6 | Kabupaten Cianjur  *Lanjutan Tabel 1.2* | 8,32 |
| 7 | Kabupaten Sumedang | 10,36 |
| 8 | Kabupaten Sukabumi | 8,18 |
| 9 | Kota Sukabumi | 18,29 |
| 10 | Kabupaten Bogor | 19,85 |
| 11 | Kota Bogor | 20,19 |
| 12 | Kota Depok | 21,27 |
| 13 | Kabupaten Karawang | 18,72 |
| 14 | Kabupaten Purwakarta | 11,22 |
| 16 | Kota Bekasi | 25,60 |
| 17 | Kabupaten Cirebon | 10,88 |
| 18 | Kabupaten Indramayu | 8,64 |
| 19 | Kabupaten Garut | 5,92 |
| 20 | Kota Tasikmalaya | 12,05 |
| 21 | Kabupaten Ciamis | 3,68 |
| 22 | Kota Banjar | 9,39 |
| 23 | Kabupaten Bandung | 11,86 |
| 24 | Kota Cimahi | 16,17 |
| 25 | Kabupaten Bandung Barat | 7,40 |
| 26 | Kota Bandung | 26,75 |

*Sumber: Laporan analisis data/pelaporan keuangan daerah provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013*

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan Pemerintahan Kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat rata-rata sebesar 12,99%, hal tersebut tergolong sangat kecil yang berarti bahwa kemampuan pemerintah kabupaten/kota untuk menggali Pendapatan Asli Daerah belum optimal. Jika dilihat pada Tabel 1.2 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah paling besar diantara pemerintahan daerah kabupaten/kota se Jawa Barat adalah kota Bandung sebesar 26,75% dari Total pendapatan daerah. Sedangkan Pemerintah daerah kabupaten/kota yang lainnya lebih rendah. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhan pemerintahnnya masih menggantungkan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Adapun yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Menurut Mardiasmo (2004:9) pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. *Aspek pertama* adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah *(Desentralisasi Fiskal)*. *Aspek kedua* yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih terbuka dan bertanggungjawab dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau *Financing Reform.*

Untuk mencapai pembangunan suatu negara diperlukan adanya pembiayaan dengan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Sehingga penting bagi pemerintah untuk manaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja keuangan. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money*  serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukuran kinerja finansial. Bagi pihak eksternal, Laporan Keuangan yang berisi informasi keuangan akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak intern, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja.

Berikut ini adalah opini hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah (pemda) kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat Tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.3

Opini Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemeintah Daerah Kabupaten/Kota se Propinsi Jawa Barat Tahun 2012 dan 2013

| No | Kabupaten/Kota | Opini Hasil Audit BPK | |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun Anggaran 2012 | Tahun Anggaran 2013 |
| 1 | Kota Cirebon | WDP | WDP |
| 2 | Kabupten Majalengka | WDP | WTP |
| 3 | Kabupaten Tasikmalaya | WDP | WDP |
| 4 | Kabupaten Kuningan | WDP | WDP |
| 5 | Kabupaten Subang | WDP | WDP |
| 6 | Kabupaten Cianjur | WDP | WDP |
| 7 | Kabupaten Sumedang | WDP | WDP |
| 8 | Kabupaten Sukabumi | WDP | WDP |
| 9 | Kota Sukabumi | WDP | WDP |
| 10 | Kabupaten Bogor | WDP | WDP |
| 11 | Kota Bogor | WDP | WDP |
| 12 | Kota Depok | WTP | WTP |
| 13 | Kabupaten Karawang | WDP | WDP |
| 14 | Kabupaten Purwakarta | WDP | WDP |
| 15 | Kabupaten Bekasi | WDP | WDP  *Dilanjutkan Tabel 1.3* |
| 16 | Kota Bekasi | WDP | WDP  *Lanjutan Tabel 1.3* |
| 17 | Kabupaten Cirebon | WDP | WDP |
| 18 | Kabupaten Indramayu | WDP | Disclaimer |
| 19 | Kabupaten Garut | WDP | WDP |
| 20 | Kota Tasikmalaya | WDP | WDP |
| 21 | Kabupaten Ciamis | WDP | WTP |
| 22 | Kota Banjar | WTP | WTP |
| 23 | Kabupaten Bandung | WDP | Disclaimer |
| 24 | Kota Cimahi | WDP | WTP |
| 25 | Kabupaten Bandung Barat | WDP | WDP |
| 26 | Kota Bandung | WDP | WDP |

*Sumber: Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia*

* *WDP (Wajar Dengan Pengecualian)*
* *WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)*

Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah masih banyak dalam kategori opini wajar dengan pengecualian, artinya belum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun masalah yang ditemukan pada saat pemeriksaan yang terjadi disetiap kabupaten dan kota adalah :

1. Para bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu tidak menyampaikan laporan pertanggungjawabannya.
2. Para bendahara tidak menyetorkan sisa kas pada akhir tahun anggaran secara tepat waktu.
3. Penatausahaan aset tetap belum tertib, penyajiannya belum didukung daftar rincian, belum ada penomoran atau kodefikasi dan bahkan ada aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya.
4. Pengendalian atas pengelolaan pendapatan daerah yang belum memadai dimana penatausahaan piutang pajak dan retribusi daerah yang tidak tertib, penggunaan langsung atas pendapatan daerah, serta tunggakan pajak yang berpotensi tidak tertagih.
5. Pengelolaan belanja daerah yang belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan realisasi belanja daerah yang belum dipertanggungjawabkan.
6. Ada kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan gedung, jalan, jembatan dan jaringan irigasi, ini membuat kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga. Belum lagi ada denda keterlambatan yang belum dikenakan kepada pihak ketiga atas keterlambatan penyelesaian suatu kegiatan.
7. Lemahnya sistem pengendalian internal atas pengelolaan dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan, belum didukung laporan pertanggungjawaban dan penerimanya.

Fenomena yang terlihat di Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Priangan Timur Tahun Anggaran 2012 dan 2013, menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang material. Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan ini, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa terdapat hal-hal yang menyebabkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tidak memperoleh keyakinan yang memadai terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten atau Kota di wilayah Priangan Timur. Sehingga dari 26 Kabupaten dan Kota, yang mendapat opini Wajar Tanpa pengecualian 4 Kabupaten/Kota, opini disclamer 2 kabupaten dan sisanya sebanyak 20 Kabupaten/Kota mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian.

Dengan melihat hasil temuan atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan opini yang diberikan kebanyakan Wajar Dengan Pengecualian maka itu menunjukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah belum optimal dalam pengelolaan keuangan daerah. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004:9) bahwa salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Berhubungan dengan pengelolaan keuangan, maka sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengharuskan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dapat semakin diwujudkan.

Untuk itu, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah kemudian diatur lebih Ianjut dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien, ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan rnelalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Pasal 1 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungja –waban dan pengawasan keuangan daerah. Kondisi dan permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah pada masing-masing daerah adalah tidak sama, karena menyangkut tersedianya sumber, tingkat kemajuan serta kemampuan sumber-sumber yang ada.

Dalam rangka upaya pendayagunaan aparatur, termasuk di dalamnya para pejabat dan staf yang mengelola keuangan dan pendapatan daerah, perlu diberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk menggali potensi sumber pendapatan daerah yang ada serta mengelola administrasi keuangan daerah secara baik, sehingga dapat digunakan secara efisien dalam pembangunan daerah. Adapun permasalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah diantaranya:

1. Masalah pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah
2. Masalah pengukuran potensi-potensi sumber penerimaan daerah
3. Masalah penggalian dan pemungutan pajak daerah.
4. Masalah pengadministrasian penerimaan daerah (sistem dan organisasi).

Berikut adalah salah satu dari unsur pengelolaan keuangan daerah yang pelaksanaanya masih belum sesuai harapan. Berdasarkan data dari laporan analisis data/pelaporan keuangan daerah provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013 menggambarkan proporsi realisasi belanja operasi dan realisasi belanja modal terhadap total belanja di wilayah propinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada Tabel 1.4 dibawah ini:

Tabel 1.4

Proporsi Realisasi Belanja Operasi dan Realisasi Belanja Modal terhadap Realisasi Total Belanja Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013

| No | Kabupaten/Kota | Realisasi  Belanja Operasi  (%) | Realisasi Belanja Modal (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kota Cirebon | 82,89 | 17,11 |
| 2 | Kabupten Majalengka | 84,64 | 15,19 |
| 3 | Kabupaten Tasikmalaya | 88,09 | 11,08 |
| 4 | Kabupaten Kuningan | 82,38 | 14,75 |
| 5 | Kabupaten Subang | 86,16 | 13,66 |
| 6 | Kabupaten Cianjur | 87,11 | 12,52 |
| 7 | Kabupaten Sumedang | 84,80 | 12,12 |
| 8 | Kabupaten Sukabumi | 88,32 | 10,95 |
| 9 | Kota Sukabumi | 90,98 | 9,01 |
| 10 | Kabupaten Bogor | 77,29 | 21,73 |
| 11 | Kota Bogor | 87,46 | 12,37 |
| 12 | Kota Depok | 77,84 | 21,88 |
| 13 | Kabupaten Karawang | 87,67 | 10,62 |
| 14 | Kabupaten Purwakarta | 82,99 | 14,65 |
| 15 | Kabupaten Bekasi | 71,11 | 27,70 |
| 16 | Kota Bekasi | 83,61 | 16,34 |
| 17 | Kabupaten Cirebon | 84,97 | 11,11 |
| 18 | Kabupaten Indramayu | 85,30 | 14,56 |
| 19 | Kabupaten Garut | 90,88 | 8,98 |
| 20 | Kota Tasikmalaya | 88,62  *Dilanjutkan Tabel 1.4* | 11,39 |
| 21 | Kabupaten Ciamis | 86,73  *Lanjutan Tabel 1.4* | 13,03 |
| 22 | Kota Banjar | 68,70 | 31,25 |
| 23 | Kabupaten Bandung | 91,56 | 7,01 |
| 24 | Kota Cimahi | 85,87 | 13,93 |
| 25 | Kabupaten Bandung Barat | 88,08 | 11,92 |
| 26 | Kota Bandung | 80,05 | 19,87 |

*Sumber: Laporan analisis data/pelaporan keuangan daerah provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013*

Dari Tabel 1.4 diketahui bahwa proporsi belanja operasi lebih tinggi dengan rata-rata tiap pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat sebesar 78,03 % dari pada belanja modal. Proporsi Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat rata-rata 14,80%. Ini berarti bahwa pemerintah kabupaten dan kota, belanja daerah lebih banyak dialokasikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional untuk pemenuhan belanja pegawai sedangkan yang dialokasikan untuk belanja modal dalam penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat masih rendah sehingga tidak sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

Adapun tujuan otonomi daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa:  Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut disebutkan adanya 3 (tiga) [tujuan otonomi daerah](http://otonomidaerah.com/pengertian-otonomi-daerah.html), yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Sementara upaya peningkatan daya saing diharapkan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keistimewaan atau kekhususan serta potensi daerah dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Baridwan (2004:27) menegaskan bahwa tuntutan publik akan pemerintahan yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan dan pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan dalam manajemen pemerintahan.

Pengelolaan keuangan daerah juga dipengaruhi dengan adanya reformasi keuangan daerah. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Halim (2012:3), peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dengan adanya reformasi keuangan, peluang yang muncul dari reformasi keuangan adalah pemerintah daerah mempunyai peluang untuk menunjukkan kemampuan mengelola keuangan daerah secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Sedangkan tantangannya adalah pemerintah daerah harus menyediakan sumber daya manusia yang handal dalam mengelola keuangan beserta sumber daya daerah, sehingga menuntut bagian keuangan maupun dinas pendapatan atau badan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta unit pelaksana lain untuk terus bekerja keras.

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan sistem informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan sistem informasi untuk membangun jaringan sistem informasi keuangan dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan mengenai variabel yang akan di teliti, peneliti menggunakan Pra survey untuk menganalisis fenomena di lapangan mengenai variabel-variabel penelitian dengan responden sebanyak 30 orang kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tersebar secara acak pada 6 Kabupaten/kota di wilayah Priangan Timur. Peneliti mengambil lokus di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur dengan alasan kinerja keuangan di wilayah tersebut masih belum optimal karena masih banyak yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian. Data hasil pra survey variabel Kinerja keuangan terlihat pada tabel 1.5

Tabel 1.5

Data Hasil Pra Survey Variabel Kinerja Keuangan Daerah

| No | Dimensi | Target | Realisasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kesesuaian dengan Satandar Akuntansi Pemerintahan (SAP)   1. Komponen laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan SAP. 2. Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan. 3. Penerapan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. 4. Pengakuan atas unsur laporan keuangan. | 100%  100%  100%  100% | 75%  70%  70%  55% |
| 2 | Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.   1. Laporan keuangan disusun sebagai implementasi dari amanah pasal 28 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003. 2. Peraturan perundangan lainnya yang menyangkut tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah | 100%  100% | 50%  60% |
| 3 | Kecukupan pengungkapan  (*Adequate Disclousures)*  Semua data yang terdapat dalam laporan keuangan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. | 100%  *Dilanjutkan Tabel 1.5*  *Lanjutan Tabel 1.5* | 75% |
| 4 | Efektivitas sistem pengendalian intern.   1. Seluruh transaksi telah dicatat, diproses dan diringkas secara memadai untuk penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Semua asset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan ataupelepasan hak yang tidak sah. 3. Semua transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan. | 100%  100%  100% | 75%  45%  60% |

*Sumber: Olah data Pra Survey*

Dari Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam realisasinya baru mencapai mencapai kisaran 45% sampai dengan 75% . Hal tersebut sesuai dengan fakta dilapangan ada beberapa aspek yang masih rendah, diantaranya: pengakuan atas unsur laporan keuangan masih rendah, penyusunan laporan keuangan masih rendah, dan penatausahaan asset masih rendah. Dari kelemahan tersebut maka hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan berupa opini yang dikeluarkan adalah opini wajar dengan pengecualian. Artinya menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan ketidakefektivan sistem pengendalian intern serta ketidakpatutan yang material. Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan ini, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa terdapat hal-hal yang menyebabkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tidak memperoleh keyakinan yang memadai terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten atau Kota di wilayah Priangan Timur. Sehingga dari 26 Kabupaten dan Kota, yang mendapat opini Wajar Tanpa pengecualian 4 Kabupaten/Kota, opini disclamer 2 kabupaten dan sisanya sebanyak 20 Kabupaten/Kota mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian.

Dengan melihat hasil temuan atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah dan opini yang diberikan kebanyakan Wajar Dengan Pengecualian maka itu menunjukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah belum optimal. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang belum optimal diduga dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan daerah yang masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Semakin banyak temuan pemeriksaan, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dari pemerintah daerah tersebut yang merupakan salah satu komponen yang dinilai dalam laporan keuangan pemerintah daerah rendah, sehingga pengelolaan keuangan tersebut kurang baik yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dari pemerintah daerah tersebut.

Data hasil pra survey Variabel pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 1.6 dibawah ini:

Tabel 1.6

Data Hasil Pra Survey Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah

| No | Dimensi | Target | Realisasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perencanaan/penganggaran   1. Dalam perencanaan diterapkan prinsip keseimbangan, yaitu ada asumsi yang rasional terjadi keseimbangan antara rencana penerimaan dan pengeluaran. 2. Dalam perencanaan diterapkan prinsip komprehensif, yaitu seluruh kegiatan yang akan dilakukan dan mempunyai akibat keuangan harus dicantumkan dalam anggaran; 3. Dalam perencanaan diterapkan prinsip Kemandirian, yaitu adanya usaha-usaha dan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan; 4. Dalam perencanaan diterapkan prinsip Terperinci, yaitu secara detail memuat rincian mengenai penerimaan maupun pengeluaran melalui kode setiap mata anggaran; 5. Dalam perencanaan diterapkan prinsip Disiplin, yaitu rencana APBD harus sudah diajukan sesuai jadwal waktu yang sudah ditentukan sehingga perlu diperhatikan saat penyusunan dan pengesahannya; 6. Dalam perencanaan diterapkan prinsip Fleksibel, yaitu karena disadari bahwa anggaran pada dasarnya masih merupakan rencana sehingga dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya perubahan; 7. Dalam perencanaan diterapkan prinsip Prioritas, yaitu penyusunan anggaran diupayakan dapat mempertajam keutamaan penggunaan dana yang tersedia untuk pembiayaan program dan kegiatan; 8. Dalam perancanaan diterapkan prinsip Keterbukaan, yaitu apabila rancangan anggaran APBD telah disetujui untuk dilaksanakan, maka anggaran tersebut harus dipublikasikan untuk diketahui oleh semua pihak. | 100%  100%  *Dilanjutkan Tabel 1.6*  *Lanjutan Tabel 1.6*  100%  100%  100%  100%  100%  100% | 45%  75%  50%  70%  75%  70%  75%  60% |
| 2 | Penatausahaan   1. Dilakukannya penatausahaan pendapatan 2. Dilakukannya penatausahaan belanja 3. Dilakukannya penatausahaan untuk kekayaan dan kewajiban daerah | 100%  100%  100% | 65%  70%  45% |
| 3 | Pertanggungjawaban   1. Menyampaikan pertanggungjawaban berupa laopran realisasi anggaran 2. Menyampaikan pertanggungjawaban berupa neraca. 3. Menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan arus kas 4. Menyampaikan pertanggungjawaban berupa catatan atas laporan keuangan | 100%  100%  100%  100% | 75%  70%  78%  75% |
| 4 | Pengawasan   1. Inspektorat cukup efektif dalam melakukan pengawasannya. 2. Aplikasi standar dan prosedur audit internal dapat diterima oleh semua SKPD 3. Temuan audit internal ditanggapi secukupnya. | 100%  100%  100% | 78%  75%  70% |

*Sumber: Olah data Pra Survey*

Dari Tabel 1.6 di dapat dilihat bahwa pengelolaan keuangan yang terbagi atas 4 (empat) dimensi yaitu: (I). Perencanaan/penganggaran, (II). Penatausahaan, (III). pertanggungjawaban dan (V). pengawasan. Hasil pra survey tersebut menunjukan bahwa pengelolaan keuangan secara keseluruhan masih belum optimal. Berdasarkan pengamatan pra survey untuk realisasi masih dalam kisaran 45% sampai dengan 75% artinya belum mencapai 100% sesuai dengan yang ditargetkan. Hal tersebut sesuai dengan fakta dilapangan ada beberapa aspek yang masih rendah, diantaranya: prinsip keseimbangan dalam perencanaan masih rendah, masih rendahnya usaha-usaha daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga prinsip kemandirian dalam perencanaan belum bisa dilaksanakan sepenuhnya, serta penantausahaan untuk kekayaan dan kewajiban daerah masih rendah. Dari beberapa aspek yang masih rendah tersebut maka pengelolaan keuangan yang dilaksanakan belum optimal. Belum optimalnya pengelolaan keuangan di atas dipengaruhi oleh Variabel Reformasi Keuangan Daerah, Tata kelola pemerintahan dan Sistem informasi keuangan daerah.

Data Hasil Pra Survey Variabel Reformasi keungan daerah seperti terlihat pada Tabel 1.7 berikut ini:

Tabel 1.7

Data Hasil Pra Survey Variabel Reformasi Keuangan Daerah

| No | Dimensi | Target | Realisasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perubahan sistem anggaran   1. Melakukan Perubahan dalam proses penganggaran dari sentralistis menjadi partisipatif. 2. Melakukan Perubahan struktur anggaran dari struktur anggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. | 100%  100% | 75%  70% |
| 2 | Perubahan kelembagaan   1. Melakukan Perubahan pengelolaan keuangan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi ke masing-masing satuan kerja. 2. Melakukan Perubahan pejabat yang terkait dengan pengelolaan keuangan. 3. Melakukan Peleburan fungsi penerimaan dan pengelolaan ke dalam satu fungsi. | 100%  *Dilanjutkan Tabel 1.7*  100%  *Lanjutan Tabel 1.7*  100% | 80%  85%  90% |
| 3 | Perubahan sistem akuntansi  Melakukan Perubahan dari single entry menjadi double entry | 100% | 50% |
| 4 | Perubahan basis akuntansi  Melakukan Perubahan dari cash basis ke acrual basis. | 100% | 50% |

*Sumber: Olah data Pra Survey*

Dari Tabel 1.7 dapat dilihat bahwa reformasi keuangan darah yang terbagi atas 4 (empat) dimensi yaitu: (I). Perubahan sistem anggaran, (II). Perubahan kelembagaan, (III). Perubahan sistem akuntansi dan (IV). perubahan basis akuntansi. Dari ke empat dimensi tersebut terlihat bahwa realisasi pencapaiannya masih terdapat dalam kisaran 50% sampai dengan 90%. Hal ini terbukti dilapangan masih terdapat beberapa aspek yang masih rendah, diantaranya: masih rendahnya melakukan perubahan dari *single entry* menjadi *double entry* dan masih rendahnya pelaksanaan pencatatan dari basis kas ke penggunaan basis akrual sehingga reformasi keuangan daerah belum dilaksanakan secara optimal.

Data Hasil Pra Survey Variabel tata kelola pemerintahan seperti yang terlihat pada Tabel 1.8 berikut ini:

Tabel 1.8

Data Hasil Pra Survey Variabel Tata Kelola Pemerintahan

| No | Dimensi | Target | Realisasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akuntabilitas   1. Adanya pemberian informasi keuangan kepada masyarakat. 2. Adanya penilaian pertanggungjawaban 3. Dilakukannya pelaporan keuangan. | 100%  100%  100% | 50%  75%  80% |
| 2 | Transparansi   1. Adanya keterbukaan dalam keuangan. 2. Adanya keterbukaan dalam operasional. 3. Adanya keterbukaan dalam pengambilan keputusan. | 100%  100%  100%  *Dilanjutkan Tabel 1.8* | 45%  50%  70% |
| 3 | Partisipatif   1. Dilakukannya pengambilan keputusan yang demokratis. 2. Dilakukannya kebebasan pers. 3. Adanya kebebasan berpendapat. 4. Adanya keterlibatan masyarakat. | *Lanjutan Tabel 1.8*  100%  100%  100%  100% | 75%  45%  76%  50% |

*Sumber: Olah data Pra Survey*

Berdasarkan Tabel 1.8 menunjukkan bahwa hasil pra survey variabel tata kelola pemerintahan tersebut, mengungkapkan fakta bahwa semua dimensi telah dilaksanakan hanya dalam realisasi pelaksanaannya baru mencapai 45% sampai dengan 80%. Hal tersebut sesuai dengan fakta dilapangan ada beberapa aspek yang masih rendah, diantaranya: masih rendahnya pemberian informasi keuangan kepada masyarakat, keterbukaan atau transparansi khususnya dalam keuangan masih rendah, kebebasan pers dan keterlibatan masyarakat masih rendah sehingga tata kelola pemerintahan belum dilaksakan secara optimal

Penghambat lain terwujudnya tata kelola pemerintahan *(good governance)* di atas, jika dilihat dan kaca mata akuntansi pemerintahan, paling tidak terdapat tiga permasalahan utama mengapa *good governance* masih jauh dan kenyataan. Pertama, belum adanya sistem akuntansi pemerintah daerah yang baik yang dapat mendukung pelaksanaan pelaporan secara handal. Tidak adanya sistem akuntansi yang handal menyebabkan lemahnya pengendalian intern *(Internal control)* pemerintah daerah. Hal tersebut di alami oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Jika sistem akuntansinya tidak memadali maka sudah barang tentu sistem pencatatan dan pelaporan akuntansinya kurang handal.

Kedua, sangat terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang belatar belakang pendidikan akuntansi, sehingga mereka tidak begitu peduli atau mungkin tidak mengerti dengan permasalahan ini. Di sisi lain, sangat sedikit sarjana akuntansi yang *quaIified* yang tertarik untuk mengembangkan profesinya di pemerintah daerah karena kompensasi yang rendah yang ditawarkan oleh pemerintah daerah.

Ketiga, belum diterapkannya secara penuh Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik yang baku. Sedangkan standar akuntansi tersebut sangat penting sebagai pedoman untuk pembuatan laporan keuangan dan sebagai salah satu mekanisme pengendalian.

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa tata kelola pemerintah Indonesia tidak berjalan dengan baik, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Jeff Hunter dan Anwar Shah, (1998) dengan mengelompokan 80 negara ke dalam *good governance, fair governance,* dan *poor governance* berdasarkan *governance quality index*. Berdasarkan penelitian tersebut Indonesia dikategorikan *poor governance*, disejajarkan dengan Cina, Nepal dan Pakistan. Sedangkan Singapura, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Sri Lanka , Philippina, India, Thailand masuk kategori tata kelola yang baik. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Booz-Allen and Hamilton (2000), dengan mengelompokkan negara di Asia Tenggara menjadi : *good governance* dan *poor governance*, berdasarkan Indeks Efisiensi Peradilan, Indeks Korupsi, Indeks tata kelola. Indonesia dikategorikan negara dengan *poor governance* dengan besaran indeks efiensi peradilan 2,50, indeks korupsi 2,15, dan indeks tata kelola 2,88. Sedangkan Malaysia dan Singapura di kategorikan *good governance* (tata kelola yang baik).

Kemudian *Transparency International* (2005), juga melakukan penelitian dengan hasil bahwa peringkat korupsi di Indonesia berada pada posisi rangking 137 dan 158, dengan nilai indeks prestasi korupsi 2,2. Pada tahun 2006 IPK Indonesia 2,4, sedangkan Singapura (9,4), Hongkong (8,3), Jepang (7,6), Taiwan (5,9), Korea Selatan (5,1) dan Malaysia (5,0) jauh berada di atas Indonesia. Menurut *Transparency International* (2006) indeks prestasi korupsi, negara-negara miskin dirangking indeks yang rendah dibawah 5 (lima). Ini memberi indikasi, terdapat korelasi yang kuat antara korupsi dan kemiskinan, dengan temuan bahwa hampir tiga perempat negara-negara yang disurvei dalam IPK (2006) memperoleh skor dibawah lima.

Data Hasil Pra Survey Variabel sistem informasi keuangan seperti yang terlihat pada Tabel 1.9 berikut ini:

Tabel 1.9

Data Hasil Pra Survey Variabel Sistem Informasi Keuangan

| No | Dimensi | Target | Realisasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perangkat keras   1. Tersedianya komponen-komponen fisik berupa peralatan pengolah *(processor).* 2. Tersedianya peralatan untuk memngingat yang berupa memori. 3. Tersedianya peralatan output . | 100%  100%  100% | 78%  75%  80% |
| 2 | Perangkat Lunak  Tersedianya aplikasi program untuk pencatatan transaksi. | 100% | 75% |
| 3 | Pengguna   1. Pegawai yang menjadi operator betul-betul terlatih dalam penggunaan sistem. 2. Pegawai terampil dalam penggunaan sistem tersebut. | 100%  100%  *Dilanjutkan Tabel 1.9*  *Lanjutan Tabel 1.9* | 45%  50% |
| 4 | Basis Data *(Database)*   1. Database yang telah diterapkan dapat memudahkan pengguna dalam melakukan pengelolaan informasi. 2. Data base yang diterapkan dapat memudahkan penggunan dalam mengontrol data. | 100%  100% | 45%  50% |
| 5 | Jaringan Komunikasi *(Communication network)*   1. Jaringan komuniaksi yang diterapkan dapat diakses secara mudah. 2. Jaringan komunikasi yang diterapkan dapat memberikan akses informasi dengan cepat dan up to date. | 100%  100% | 46%  50% |

*Sumber: Olah data Pra Survey*

Dari Tabel 1.9 dapat dilihat bahwa sistem informasi keuangan daerah yang terbagi atas 4 (empat) dimensi yaitu: (I). perangkat keras, (II). Perangkat lunak, (III).Pengguna, (IV). Basis data dan (V). Jaringan komunikasi. Dari ke lima dimensi tersebut terlihat bahwa realisasi pencapaiannya masih terdapat dalam kisaran 45% sampai dengan 80%. Hal tersebut sesuai dengan fakta dilapangan ada beberapa aspek yang masih rendah, diantaranya: pegawai yang menjadi operator dalam penggunaan sistem masih rendah dan belum terlatih, data base yang diterapkan belum memudahkan pengguna serta jaringan komunikasi yang diterapkan belum dapat diakses secara mudah dan cepat. Dari rendahnya beberapa aspek tersebut maka sistem informasi keuangan yang diterapkan belum optimal

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kinerja keuangan Pemerintah daerah kabupaten/kota khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai objek studi disertasi ini, kemudian peneliti tuangkan ke dalam judul penelitian “**Pengaruh Reformasi Keuangan Daerah, Tata kelola Pemerintahan dan Sistem Informasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implikasinya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Priangan Timur.”**

* 1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Kemandirian pemerintah daerah cenderung masih rendah.
2. Sumber-sumber pendapatan daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan secara baik.
3. Pengukuran potensi-potensi sumber penerimaan daerah belum optimal.
4. Penggalian potensi penerimaan daerah belum optimal.
5. Dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih rendah.
6. Belanja daerah lebih banyak dialokasikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional untuk pemenuhan belanja pegawai sedangkan yang dialokasikan untuk belanja modal dalam penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat masih rendah.
7. Pengelolaan belanja daerah yang belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengendalian atas pengelolaan pendapatan daerah yang belum memadai dimana penatausahaan piutang pajak dan retribusi daerah yang tidak tertib, penggunaan langsung atas pendapatan daerah, serta tunggakan pajak yang berpotensi tidak tertagih.
9. Masalah pengadministrasian penerimaan daerah (sistem dan organisasi) belum sepenuhnya dilaksanakan.
10. Lemahnya sistem pengendalian internal atas pengelolaan dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan, belum didukung laporan pertanggungjawaban dan penerimanya.
11. Kinerja keuangan pemerintah daerah masih belum optimal.
12. Kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan daerah masih kurang.
13. Dana perimbangan dari pemerintah pusat sangat besar kontribusinya.
14. Tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah belum dilaksanakan secara optimal.
15. Penerapan sistem akuntansi dari *single entry* ke *double entry* belum sepenuhnya dilaksanakan.
16. Penerapan basis akrual belum sepenuhnya dilaksanakan.
    1. **Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut diatas, peneliti menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini lebih menekankan pada bidang ilmu manajemen khususnya manajemen keuangan sektor publik. Kajiannya diarahkan pada analisis Reformasi Keuangan Daerah, Tata kelola Pemerintahan ,Sistem Informasi keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama dalam kaitannya dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintahan daerah di Wilayah Priangan Timur
2. Lokus dibatasi kepada Pemerintah Daerah di Wilayah Priangan Timur dengan alasan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah di Wilayah Priangan Timur dilihat berdasarkan hasil Opini Badan pemeriksa Keuangan rata-rata dalam kriteria wajar dengan pengecualian, maka perlu adanya peningkatan yang lebih baik.
3. Unit analisis adalah pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan verifikatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui kondisi eksisting variable dalam penelitian, sedangkan analisis verifikatif bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan kausalitas antar variabel serta untuk menguji suatu hipotesis.
5. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis).*
   1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Reformasi Keuangan Daerah pada Pemerintahan Daerah di Wilayah Priangan Timur.
2. Bagaimana Tata kelola Pemerintahan pada Pemerintahan Daerah di Wilayah Priangan Timur.
3. Bagaimana Sistem Informasi Keuangan pada Pemerintahan Daerah di Wilayah Priangan Timur.
4. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Priangan Timur.
5. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Priangan Timur.
6. Seberapa besar pengaruh Reformasi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan di Pemerintahan Daerah Wilayah Priangan Timur.
7. Seberapa besar pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pengelolaan Keuangan di Pemerintahan Daerah Wilayah Priangan Timur.
8. Seberapa besar pengaruh Sistem Informasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan di Pemerintahan Daerah Wilayah Priangan Timur.
9. Seberapa besar pengaruh Reformasi Keuangan Daerah, Tata kelola Pemerintahan dan Sistem Informasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Priangan Timur.
10. Seberapa besar pengaruh Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Priangan Timur.
    1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengkaji dan mengetahui:

1. Reformasi Keuangan Daerah pada Pemerintahan Daerah di Wilayah Priangan Timur.
2. Tata kelola Pemerintahan pada Pemerintahan Daerah di Wilayah Priangan Timur
3. Sistem Informasi Keuangan pada Pemerintahan Daerah di Wilayah Priangan.
4. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Priangan Timur.
5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Priangan Timur.
6. Pengaruh Reformasi Keuangan Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan di Pemerintahan Daerah Wilayah Priangan Timur.
7. Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pengelolaan Keuangan di Pemerintahan Daerah Wilayah Priangan Timur.
8. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan di Pemerintahan Daerah Wilayah Priangan Timur.
9. Pengaruh Reformasi Keuangan Daerah, Tata kelola Pemerintahan dan Sistem Informasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Priangan Timur.
10. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Priangan Timur.
    1. **Manfaat Penelitian**
       1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan sumbangan dalam pengembangan ilmu manajemen, khususnya ilmu manajemen keuangan. Melalui penelitian ini dikembangkan metode-metode untuk menggali data tentang Reformasi Keuangan Daerah, Tata Kelola Pemerintahan, Sistem Informasi Keuangan, Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Keuangan.

* + 1. **Manfaat Praktis**

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam mengambil langkah-langkah dalam meningkatkan reformasi keuangan daerah, tata kelola pemerintahan, sistem informasi keuangan dan pengelolaan keuangan.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam membuat kebijakan bagi pemerintah daerah.